

## **STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN**

**(Studi Program “Bupati Ronda” di Kabupaten Lampung Tengah)**

**Anna Gustina Zainal<sup>1)</sup>, Sarwititi Sarwoprasodjo<sup>2)</sup>**

1)Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung

2)Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor

Alamat Email : anna.gustina@fisip.unila.ac.id

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the implementation of communication strategy by government of Lampung Tengah Regency to increase knowledge and participation of rural community in socializing Bupati RONDA program. This study uses a qualitative method. Leadership research results, local leaders have political leadership that concerns all aspects of community life in a region. A good leader is obtained from a long process, not appearing suddenly. Leadership is the ability to influence others to do what the leader voluntarily wants. A local head who has the capacity as a political official and a government leader in his or her region should have leadership in the field of organization and leadership in the social field. The leadership strategy of a local government official applied will have a significant effect on the public service that will be provided to the community. Government is an institution that has the obligation to provide public services for the welfare of its people, besides the state must serve every citizen and residents in fulfilling their basic rights and needs. The role of all stakeholders in the success of the development program is very necessary, especially how the program can be implemented in accordance with community needs. The community can enjoy the results of development in order to achieve development goals, namely the welfare of the community. Development can be achieved well when people can participate directly in all these developments. Participation is where villagers are invited to take part in decision-making in the village because they are the ones who better understand what the village needs for prosperity..*

**Keywords:** communication strategy , Government, Participation, community.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi strategi komunikasi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat pedesaan dalam menyosialisasikan program Bupati RONDA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian pemimpin daerah memiliki political leadership yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemimpin yang baik diperoleh dari proses yang panjang, tidak muncul secara tiba-tiba. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Seorang kepala daerah yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya, haruslah mempunyai kepemimpinan di bidang organisasi dan kepemimpinan di bidang sosial. Strategi kepemimpinan seorang pejabat pemerintah daerah yang diterapkan akan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Pemerintah adalah institusi yang memiliki kewajiban menyediakan layanan publik bagi kesejahteraan rakyatnya, selain itu negara wajib melayani setiap warga dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Peranan seluruh stakeholder dalam menyukseskan program pembangunan sangat diperlukan terutama bagaimana program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan masyarakat. Pembangunan dapat tercapai dengan baik ketika masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam semua pembangunan tersebut. Partisipasi tersebut adalah dimana warga desa diajak untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan di desa karena merekalah yang lebih memahami yang yang dibutuhkan desa demi kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Strategi Komunikasi, Pemerintah, Partisipasi, masyarakat.

## PENDAHULUAN

Strategi pembangunan menentukan strategi komunikasi, maka makna komunikasi pembangunan pun bergantung pada modal atau paradigma pembangunan yang dipilih oleh suatu negara. Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju dari sebelumnya. Oleh karena itu peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan.

Pembangunan merupakan proses yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Jika dilihat dari segi ilmu komunikasi yang juga mempelajari masalah proses, yaitu proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk merubah sikap, pendapat dan perilakunya. Maka pembangunan pada dasarnya melibatkan minimal tiga komponen yakni komunikator pembangunan (bisa aparat pemerintah atau masyarakat), pesan pembangunan yang berisi ide atau program pembangunan dan komunikan pembangunan, yaitu masyarakat luas sasaran pembangunan

Pemimpin daerah yang dikenal dengan Kepala Daerah merupakan pemimpin bagi masyarakat di daerahnya. Dia dipilih langsung oleh rakyat di daerah tersebut, oleh

karena itu, hal penting yang perlu dilakukannya adalah peduli terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut mayoritas masyarakat. Banyaknya persoalan yang berujung pada konflik dan kerusakan di daerah menandakan belum efektifnya komunikasi yang dilakukan kepala daerah dengan rakyat dan bawahannya. Dalam hal ini komunikasi yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi. Dalam komunikasi organisasi, kajian tentang kepemimpinan seringkali dibahas. Kepemimpinan mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau lebih individu dalam kelompok yang membantu kelompok mencapai tujuannya.

Dalam bidang kepemimpinan, pemimpin daerah memiliki *political leadership* yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemimpin yang baik diperoleh dari proses yang panjang, tidak muncul secara tiba-tiba. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Seorang kepala daerah yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya, haruslah mempunyai kepemimpinan di bidang organisasi dan kepemimpinan di bidang sosial. Di bidang organisasi, seorang kepala daerah mempunyai bawahan yang patuh pada berbagai ikatan norma-norma organisasi formal. Di bidang sosial, seorang kepala daerah memiliki kapasitas dan kualitas pribadi dalam menggerakkan bawahannya.

Dalam hal ini aspek sosial dan politik lebih dominan daripada aspek administratif. Kepemimpinan di bidang sosial lebih banyak diperoleh dari proses politik yang membawa dirinya menjadi kepala daerah. Kepemimpinan berhubungan erat dengan komunikasi, tujuan komunikasi adalah mencapai kesamaan makna. Pada dasarnya kesamaan makna ini merupakan upaya untuk mempengaruhi karena makna yang dimaksud adalah makna yang dikehendaki oleh satu pihak yang ditujukan pada pihak lain. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.

Strategi kepemimpinan seorang pejabat pemerintah daerah yang diterapkan akan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Pemerintah adalah institusi yang memiliki kewajiban menyediakan layanan publik bagi kesejahteraan rakyatnya, selain itu negara wajib melayani setiap warga dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Penyelenggaraan layanan publik juga harus membangun kepercayaan masyarakat seiring dengan tuntutan dan harapan publik atas peningkatan kualitas layanan publik (UU No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik). Pelayanan publik dapat dilihat sebagai usaha dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat atau publik, maka dari itu tentu publik menginginkan adanya pelayanan yang maksimal dari aparat publik terhadap publik itu sendiri.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi publik tersebut, terutama di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Bupati Lampung Tengah, Mustafa meluncurkan program Bupati Ronda malam di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah, melalui program ini diharapkan selain dapat meningkatkan keamanan wilayah juga akan menysasar pada bidang sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan tata kota.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi komunikasi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat pedesaan melalui program BUPATI RONDA.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam rumusan *strategi public realtions* Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya menyosialisasikan program kerja BUPATI RONDA kepada masyarakat dalam kondisi alamiah. Hal ini merujuk kepada yang dikemukakan oleh Maleong, (2013) Metode kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami, yang didasarkan pada tradisi penelitian dengan metode yang khas, yang meneliti masalah manusia atau masyarakat. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan melakukan penelitian dalam setting alamiah.

Paradigma yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruktivisme, seperti yang dipaparkan oleh Sugiyono (2010), mengadopsi mengakui adanya fakta dan realitas empirik. Sedangkan konstruktivisme berpendapat bahwa semesta secara epistemologi merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan dunia objek material. Pengalaman manusia terdiri dari interpretasi bermakna terhadap kenyataan dan bukan reproduksi kenyataan. Dengan demikian dunia muncul dalam pengalaman manusia secara terorganisasi dan bermakna. Keberagaman pola konseptual/kognitif merupakan hasil dari lingkungan historis, *cultural*, dan personal yang digali secara terus-menerus. (Ayub, 2013)

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah instansi pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, setiap organisasi pasti memiliki interaksi dan strategi dalam berhubungan dengan para stakeholdersnya atau publiknya. Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah instansi pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, setiap organisasi pasti memiliki interaksi dan strategi dalam berhubungan dengan para stakeholdersnya atau publiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyosialisasikan program kerja BUPATI RONDA kepada masyarakat.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.

Sugiyono (2010) menyebutkan bahwa studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial serta kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana sumber bukti dimanfaatkan. Secara umum studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang lebih cocok jika pertanyaan penelitian berkenaan dengan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa). Kasus yang terdapat pada penelitian ini yaitu masih banyak masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang belum mengetahui program kerja BUPATI RONDA yang sedang dijalani Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Pertanyaan penelitian “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*) melingkupi bagaimana pemahaman aparatur pemerintahan & masyarakat, strategi komunikasi dan hambatan yang dialami dalam menyosialisasikan program Kerja BUPATI RONDA. Penelitian ini merupakan *a bounded system* yaitu satu kesatuan yang utuh dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Penelitian ini juga bersifat *single case* Maqbool, dkk (2014). dimana tujuan dari program ini adalah menyosialisasikan program Bupati Ronda kepada masyarakat agar masyarakat, dan pemerintah bisa berkerja sama untuk menjadikan Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten termaju di Propinsi Lampung.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010),

*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam proses pengadaan data primer untuk kepentingan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Moleong, 2013).

Observasi penelitian ini dilakukan di pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu dilakukan dengan cara mencatat semua informasi yang dibutuhkan peneliti terhadap informan. Observasi dilaksanakan dengan izin oleh pihak-pihak yang menyangkut penelitian. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi. Observasi adalah proses pengumpulan data primer dengan menggunakan pengamatan langsung atau meneliti sendiri gejala-gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui pencatatan. (Moleong, 2013)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi komunikasi merupakan suatu konsep yang banyak diadopsi dari berbagai ilmu ekonomi, politik atau biasa ditemukan pada istilah militer dalam peperangan,

namun kata “strategi” merujuk pada seperangkat komponen atau unsur dalam komunikasi yang sangat spesifik berdasarkan konteks yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan atau efektifitas komunikasi. Hamijoyo (1999) menyebutkan bahwa dalam strategi komunikasi akan ada perencanaan, taktik, pengenalan lapangan (*fact finding*), perhitungan lingkungan/ekologi komunikasi, pelaksanaan sampai pada target sasaran. Dengan demikian strategi komunikasi dalam satu konteks atau sebuah situasi, tidak akan persis sama dapat diterapkan dalam konteks lain. Namun demikian peran dan fungsi strategi komunikasi dalam sebuah lembaga atau aktivitas komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum Thompson (2001) menggambarkan unsur strategi komunikasi sebagai berikut: *Pertama*, visi organisasi atau perspektif harus dimiliki dan dijadikan acuan dalam mengatur lebih lanjut aktivitas komunikasi. *Kedua*, menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi, perencanaan yang tepat juga berangkat dari serangkaian data dan informasi yang ditemukan di lapangan (*fact finding*). *Ketiga*, menetapkan taktik, yaitu langkah-langkah praktis yang harus ditempuh, dengan sudah mempertimbangkan kemampuan internal serta situasi atau keadaan lapangan. *Keempat*, meletakkan posisi atau kedudukan organisasi maupun program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber,

pesan serta target sasaran; *Kelima* adalah menyusun pola aktivitas komunikasi, sehingga strategi menjadi jelas dan dapat diikuti atau dijalankan oleh semua pelaku komunikasi.

Strategi komunikasi politik yang terkait dengan partisipasi partai politik secara spesifik sukar ditentukan, oleh karena itu, keberagaman kondisi internal dan lingkungan budaya setempat. Dalam perspektif komunikasi persuasif (Applbaum Anatol, 1974; Atie Racmattie dkk, 2013), strategi komunikasi berarti mempertimbangkan *a specific environmental setting*; yaitu, hubungan kaum wanita dengan lingkungannya dalam konteks politik yang spesifik, seperti dalam rekrutmen keanggotaan atau pemimpin dalam partai, kampanye, negosiasi, rapat sehari-hari, sidang parlemen, temu konstituen dan aktivitas lainnya. Dalam proses komunikasi ini, semua transmisi informasi politik antara kaum partai politik sebagai sumber atau komunikator dan sebaliknya sebagai penerima; menggunakan pesan verbal dan non verbal, tidak lepas dari *frame of reference* dan *field of experience*-nya. Untuk itu pengorganisasian, isi pesan, perangkaian bahasa dan penampilan simbol yang akan disampaikan, harus mempertimbangkan efek yang bakal dihasilkan. Sebagai komunikator, kaum partai politik harus selektif mentransmisikan atau menolak sebuah pesan, mengulang-ulang atau meringkas pesan dalam rangka mengambil keputusan yang tepat bagi lawan bicaranya.

Strategi komunikasi ini pun mempertimbangkan semua elemen komunikasi yang berkaitan, seperti dikemukakan lebih lanjut oleh Applbaum & Anatol terdapat beragam model *interrelationship* yang tergantung bagaimana situasi hubungan timbalbalik antara unsur-unsur yang ada pada peristiwa komunikasi tersebut. Hubungan komponen komunikasi itu diantaranya: (1) *The source-receiver relationship* yaitu hubungan yang ditentukan oleh tujuan dari aktivitas komunikasi; (2) *The source-environment relationship*, merujuk pada efek sosial, politik dan budaya pada narasumber dalam situasi komunikasi tertentu; (3) *The receiver-environment relationship*, merujuk pada efek sosial, politik dan budaya pada seperangkat kondisi psikologis pada penerima; (4) *The receiver-message relationship*, merujuk pada efek komunikasi yang muncul pada penerima yang disebabkan oleh bentuk, isi dan penyajian pesan (Dyson, 2004). Dengan demikian, elemen utama untuk menetapkan strategi komunikasi politik yang efektif dan efisien, sangat tergantung pada situasi dan lingkungan ketika komunikasi politik tersebut berlangsung. Hal ini akan ditentukan oleh pola-pola hubungan diantara para pelaku politik yang terlibat didalamnya.

Menurut Sobur dalam Mimbar (2000) bahwa komunikasi politik, sebagai layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik; dan hasil

pemerosesan itu, yang tersimpul dalam fungsi-fungsi *out-put*, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi *feed-back* sistem politik. Begitulah, komunikasi politik menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis. Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya.

Sementara itu, dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis. Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokratis. Ini artinya, adanya peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi dari seluruh warganegara tanpa pengecualian menjadi sesuatu yang mutlak.

Sebab Konsep keadilan demokratis ini selalu erat kaitannya dengan konsep "penyertaan" (*inclusion*). Namun demikian perwujudan partisipasi dalam proses kebijakan tidak berarti mengambilah mekanisme-mekanisme formal dan ruang lembaga representasi formal yang sudah ada. Pola hubungan mekanisme partisipasi dengan mekanisme perwakilan formal yang sudah ada lebih bersifat saling mengisi bukan saling meniadakan. Kehadiran mekanisme partisipasi akan menjadi elemen

penting yang akan membuat proses kebijakan berlangsung optimal. Selain itu dengan adanya partisipasi, ada banyak *lesson learning* yang akan didapat pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri. Sedangkan makna dari keterlibatan adalah adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan mutlak adanya. Sebab pada dasarnya, yang menjadi kehirauan utama dalam kebijakan publik adalah masalah publik itu sendiri. Bila masalah tersebut adalah masalah publik maka publik pula lah yang berhak menentukan penyelesaiannya (*if the problem is ours, the solution must be ours*).

Berkaitan dengan unsur partisipasi tersebut dan juga berdasarkan visi Kabupaten Lampung Tengah, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan visi sebagai berikut pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Institusi Fasilitator yang Handal dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Yang dimaksud dengan visi tersebut adalah suatu cara pandang, tekad dan cita-cita untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan dalam : 1). Mengkaji potensi dan permasalahan pembangunan desa/kelurahan; 2). Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif; 3). Mengembangkan lembaga ekonomi masyarakat dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan desa/kelurahan secara transparan dan bertanggungjawab; 4). Mengelola administrasi desa/kelurahan secara

tertib dan profesional. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat. Memperkuat dan meningkatkan fungsi Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Sosial Masyarakat yang ada di Desa melalui pelatihan dan pendampingan, baik itu lembaga adat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya di desa yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Meningkatkan sumber daya masyarakat desa dan mengoptimalkan fungsi-fungsi Pemerintah Desa melalui peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat serta mengoptimalkan pengembangan lembaga adat.
3. Pengembangan usaha ekonomi rakyat. Upaya untuk meningkatkan pendapat masyarakat perdesaan melalui kegiatan pelatihan paket usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin terutama Kepala Keluarga Perempuan, pemberian paket bantuan usaha dan pendampingan.
4. Peningkatan pemanfaatan sumber daya dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. Pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di perdesaan dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna sehingga dapat meningkatkan nilai guna dari produk lokal tersebut dan

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

5. Pemantapan dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Kelurahan melalui upaya penguatan kelembagaan dan aparatur desa dan kelurahan, penguatan manajemen pengelolaan keuangan desa dan kelurahan serta penguatan proses Musrenbangdes, Musrenbangdes dan Musrenbangkel.

Berdasarkan visi dan misi yang diemban oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah seperti yang telah dijelaskan diatas adalah merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian strategi tersebut dijabarkan dalam program-program sebagai berikut 1). Program kerjasama dengan dunia dan lembaga bilateral, multilateral dan PBB; 2). Program peningkatan keberdayaan masyarakat; 3). Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan; 4). Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 5). Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan; 6). Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.

Peranan seluruh *stakeholder* dalam menyukseskan program pembangunan sangat diperlukan terutama bagaimana program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan, yaitu



mensejahterakan masyarakat. Pembangunan dapat tercapai dengan baik ketika masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam semua pembangunan tersebut. Partisipasi tersebut adalah dimana warga desa diajak untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan di desa karena merekalah yang lebih memahami yang yang dibutuhkan desa demi kesejahteraan. Pembangunan desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas prakarsa dan swadaya masyarakat (Nimmo,2008) . Sebab, pada kenyataannya peran aktif dari pemerintah sebagai penyedia dana pembangunan tidaklah mampu menyediakan dana untuk pembangunan secara keseluruhan, lebih khusus lagi dana untuk pembangunan desa. Pemerintah hanya memberikan stimulus yang bersifat perangsang untuk memancing swadaya masyarakat.

Sehingga strategi kebijakan yang diambil di desa pun berdasarkan strategi partisipatif, yakni sebagai upaya atau tindakan dalam perumusan implementasi berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana secara *reliable*, *acceptable*, *plementable* dan *workable*. *Reliable* maksudnya adalah program pembangunan itu dirumuskan dengan menyakinkan dan terpercaya, karena dilakukan oleh semua atau oleh banyak anggota masyarakat atau yang mewakili berbagai kelompok masyarakat yang merupakan *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan. *Acceptable* artinya adalah pembangunan itu dapat diterima oleh masyarakat banyak karena akan diimplementasikan, disusun dirumuskan oleh

dan untuk anggota warga masyarakat secara bersama - sama melalui musyawarah secara terfokus. *Implentable* maksudnya adalah dapat diimplemntasikan karena program tersebut disusun oleh warga masyarakat berdasarkan potensi dan kondisi, kemampuan yang dimiliki karena masyarakat setempat sendiri yang paling mengetahui keadaan di wilayah desanya. *Workable* artinya program pembangunan tersebut dapat dikerjakan atau dilaksanakan masyarakat, sehingga apabila terdapat tantangan dan hambatan akan dapat diatasi secara partisipatif oleh masyarakat setempat, baik dalam dana dan materi maupun dalam bentuk tenaga dan pemikiran.

Program-program yang dilaksanakan berkaitan program Bupati Ronda merupakan strategi yang diciptakan oleh pemerintah agar masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses penentuan kebijakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Cornwall dan Gaventa (dalam Hamijoyo,1999) bahwa partisipasi mempunyai 3 derajat yang dilihat dari seberapa besar keleluasaan yang dibuka oleh pemerintah kabupaten Lampung Tengah, yaitu pertama; *Invited Space*. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan muncul karena ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah. Inisiatif penyediaan ruang partisipasi ini berasal dari pemerintah daerah sendiri. Inisiatif tersebut muncul biasanya dikarenakan semakin kuatnya aksi-aksi kolektif untuk mendesakkan agenda-agenda isu maupun pelembagaan ruang pelibatan publik dalam proses politik-pemerintahan di aras lokal. Namun tidak menutup kemungkinan inisiatif tersebut berasal dari faktor eksternal, seperti dukungan

lembaga donor maupun kebijakan pemerintah nasional. Dalam *invited space* penyediaan ruang partisipasi masih belum terlembaga secara kuat.

Kedua; *Conquered Space*. Penyediaan ruang bagi keterlibatan warga sudah mulai dilembagakan dalam proses kebijakan. Proses pelembagaan ini bisa dalam bentuk legalisasi pelibatan publik. Proses legalisasi ini biasa muncul dalam bentuk Perda Partisipasi Publik, Transparansi maupun Konsultasi Publik. Pelembagaan juga bisa berupa formalisasi mekanisme partisipasi. Misalnya pelembagaan mekanisme Musrembang dalam proses perencanaan daerah. Ketiga; *Popular Space*. Dalam ruang ini kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik tapi juga sudah mampu mempengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada.

Hasil evaluasi dari program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui program Bupati Ronda menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran derajat partisipasi yang semula berada pada posisi *invited space* dan sekarang berada pada posisi *conquered space*, hal ini dikarenakan oleh adanya mekanisme perencanaan dalam wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik itu pada tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan provinsi, selain itu adanya peningkatan animo masyarakat untuk selalu turut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pembangunan baik itu yang berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Pergeseran tersebut juga menggambarkan

bahwa telah terjadi peningkatan kehidupan berdemokrasi pada aras lokal, karena adanya kerja sama dari seluruh elemen masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan mereka sendiri.

Sehingga paradigma *community driven development* yaitu penciptaan iklim untuk memberi penguatan peran masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, ikut menggerakkan atau mensosialisasikan, ikut melaksanakan pembangunan, dan melakukan kontrol publik menjadi sangat signifikan. Hal itu bisa terkait dengan perencanaan, implementasi, dan keberlanjutan berbagai macam program sesuai dengan permasalahan dan urutan prioritasnya yang melalui proses demokratis, inklusif, dan transparan yang disepakati untuk ditangani bersama. Dengan demikian nantinya pembangunan, yang diarahkan mampu memperbanyak pilihan-pilihan yang dapat diambil dan dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat.

Hal lain diketahui dalam penelitian ini, adalah model komunikasi yang tepat digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Lampung Tengah dalam mensosialisasikan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang disosialisasikan melalui program Bupati Ronda adalah model komunikasi interaktif. Hasil ini sejalan yang disampaikan oleh Adam (2002) model komunikasi interaktif terbukti sangat cocok bagi masyarakat desa, maka tidak ada salahnya apabila pihak pemerintah daerah di era otonomi ini mengadopsi model komunikasi ini sebagai sarana sosialisasi program-program pembangunan di perdesaan,

dengan harapan agar kesenjangan pemerataan pembangunan desa-kota dapat segera dieleminir. Era otonomi seyogyanya disikapi secara arif oleh pemerintah daerah, dalam artian bahwa keluasan dan perluasan kewenangan yang dimilikinya hendaknya bisa dipandang secara proporsional, yakni disamping sebagai peluang juga sekaligus tantangan, terutama dalam hal melaksanakan pembangunan di wilayah perdesaan.

### KESIMPULAN

Adanya program Bupati Ronda terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan. Peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya *Good Governance*, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sehingga pemerintah dapat memetik berbagai keuntungan administratif dan politis dari ide partisipasi ini dalam proses pembuatan kebijakan. Keuntungan-keuntungan yang dapat diambil, yakni :

1. Adanya saluran komunikasi yang lebih baik. Partisipasi publik dalam proses kebijakan berhasil menciptakan pola komunikasi politik yang baik antara pemerintah dan warganya. mengkomunikasikan berbagai kepentingan pemerintah kepada masyarakat secara efektif.
2. Memunculkan ide yang kreatif dan meminimalisasi kritisisme warga. Masyarakat yang terlibat dalam proses partisipasi akan merasa turut sumbang suara dalam keputusan-keputusan yang sudah diambil dan program kegiatan

yang sudah disepakati. Akan muncul berbagai ide segar dari warga karena mereka selalu merasa menjadi bagian dari program kebijakan yang ada tersebut.

3. Lahirnya kebijakan yang responsif dan kontekstual. Partisipasi juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mampu merumuskan desain kebijakan yang sensitif dengan konteks sosial yang berkembang. Dalam proses yang partisipatif, masyarakat berhak merumuskan dan menentukan masalah mereka serta memastikan solusi yang spesifik.
4. Efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Pengalaman menunjukkan bahwa pelibatan publik dalam proses implementasi kebijakan justru lebih efektif.
5. Menguatkan modal sosial. Partisipasi publik bisa menjadi ruang untuk menciptakan modal sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif. Modal sosial yang dimaksud adalah kerjasama, rasa saling memahami, kepercayaan (trust) dan solidaritas yang terbentuk manakala pemerintah daerah dan warganya bertemu dan berembung untuk mengupayakan kebaikan bagi semua pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko. 2003.  
*Membangun Good Governance di*

- Desa. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment.
- Effendy, O.U. (2008). *Dinamika Komunikasi*. PT.Rosdakarya. Bandung.
- Maleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Roddakarya. Bandung.
- Nimmo, Dan. 2008. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. PT. Remaja Roddakarya. Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Alfabeta. Bandung
- Thompson. L John, 2001, *Understanding Corpo-rate Strategy*, Cengage Learning EMEA.
- Jurnal**
- Adam, Idris. *Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Program Pembangunan Bagi Masyarakat Pedesaan Di era Otonomi*. Jurnal Administrasi Negara Vol. II No.02 Maret 2002.
- Atie Rachiatie, O Hastiansyah, Eni Khotimah, Dadi Ahmadi, *Strategi Komunikasi politik & Budaya Transparansi Partai Politik*. Jurnal Mimbar Vol. 29 No. 2 Desember 2013
- Ayub, A., Razzaq, A., Aslam, M.S., & Iftekhar, H. (2013). A Conceptual framework on evaluating SWOT analysis as the mediator in strategic marketing planning through marketing intelligence. *European Journal of Business and Social Sciences*.
- Dyson, R.G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. *European Journal of Operational Research*. 152, 631-640
- Hamijoyo, S (1999). *Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan Peranan Komunikasi*. dalam Jurnal Mediator Volume 2 Nomor 1. Bandung
- Maqbool, L., Ahmad, N., Hayyat, M.U., Mahmood, R., Haider, Z., & Nawaz, R. (2014). Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis of environmental NGOs working in Punjab, Pakistan. *International NGO Journal*. 9(1), 11-16
- Paulus Israwan Setyoko. 2011. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 14 – 24.
- Rojak, Abdul, dkk. 2016. *Policy Paper: Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris di Indonesia*. Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Sobur, Alex (2000), *Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani*, Jurnal MIMBAR (Sosial dan Pembangunan) Volume 16, No. 2, Tahun 2000, hal. 112-137. Penerbit P2U LPPM Unisba.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*.

Anna Gustina Zainal, Sarwititi Sarwoprasodjo  
MetaCommunication; Journal Of Communication Studies  
Vol 3 No 1 Maret 2018

P-ISSN : 2356-4490  
E-ISSN : 2549-693X

Rahmainim Saragih dan Sarwititi Agung.

*Peran komunikasi politik pemerintah  
dalam upaya peningkatan partisipatif  
masyarakat dalam pemanfaatan dana  
desa. Reformasi Vol. 7 No 1 2017.*

### **Dokumen Lain**

Nurhayati DK. *Peran Komunikasi Politik*

*Dalam Pemenangan Partai Politik.*

Artikel & Opini: Media Center Dinas

Kominfo Kota Makasar. Selasa, 04

Agustus 2015